

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang Pihak Yang dapat Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Buku

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Leonard, Lapon Tukan, Aju Putrijanti, dan Adiani Mutiara Khafidzoh. *Proses Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Yuniza, Mailinda Eka, dkk. *HUKUM PTUN*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Jurnal dan Artikel

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 558. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Ermawati, Sri Wahyuni. "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 50. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>.

Fajarwati, Meirina. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 154. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.97>.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Masrufah, dan Arif Wibowo. "Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 55. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.41>.

- Mushi, Adam, dan Fenny Tria Yunita. “Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara.” *Media Iuris* 7, no. 2 (2024): 192. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>.
- Mubarok, Arqi Nur, dan Wahyu Priyanka Nata Permana. “Implementasi Putusan MK 31/PUU-X/2012 Jo. SEMA 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan Tipikor.” *Prosiding Nasional Hukum Aktual* 2, no. 1 (2024): 105–122. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33496/16537>.
- Negara, Dharma Setiawan, Erwin Susilo, dan Syamsuyar Khairul Umam. “Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Jerman dan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no.1 (2025): 4.
- Razak, Abdul, dan Zulkifli Aspan. “Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.” *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 14. <https://doi.org/10.55292/nj810e31>.
- Rofiannas, Rifai. “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Konstitusionalitas SEMA No. 7 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 1 (2017): 11–37. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p19-36>.

Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positif Legislator.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no.1 (2022): 685.

Supriyadi, Mohammad Wangsit, dkk. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 405. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.

Santoso, Raihan Andhika, dkk. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1 no. 4 (2023): 14. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

Tahir, Erdin, dan Afriman Oktavianus. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Larangan Peninjauan Kembali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 5, no. 3 (2025): 27–28. <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.35069>.

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Tugas Pokok dan Fungsi.” Diakses 6 Januari 2026, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. “Pengajuan Upaya Hukum.”

Diakses 6 Januari 2026, <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/gugatan-permohonan/prosedur-pengajuan-4>.

Tri Cahya Indra Permana (MariNews). Bom Waktu Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.”

Diakses 22 April 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/bom-waktu-badan-atau-pejabat-tata-usaha-negara-tidak-dapat-0AF>.